



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STRATEGI BARU INDUSTRIALISASI NASIONAL (SBIN)

TAUFIQ ACHMARUDIN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA,
FARMASI, DAN TEKSTIL



<http://ikft.kemenperin.go.id>



Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin



ditjen.ikft

TANTANGAN LINGKUNGAN INDUSTRI KONTEMPORER:



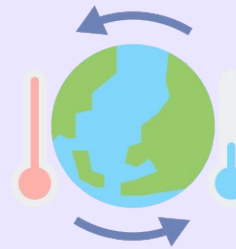
Pandemi

Gangguan rantai pasok global, pengurangan produktivitas dan utilitas, PHK



Ketegangan Geopolitik

Fragmentasi geoekonomi, perang dagang, ketidakpastian akses pasar



Isu Perubahan Iklim

Pengetatan standar lingkungan, carbon border adjustment, perluasan non-tarif barrier



Revolusi Teknologi Digital

Perubahan cara produksi, model bisnis, hingga rantai produksi

8 SASARAN UTAMA SBIN



8 ASTA CITA

**RPJMN 2025-2029
(PERPRES 12/2025)**

Membangun kemandirian bangsa melalui pemantapan fondasi pertahanan dan keamanan negara (terutama di bidang pangan dan kesehatan); serta teknologi industri dan mobilisasi sumber daya, termasuk energi, air, ekonomi kreatif, industri hijau dan industri biru

Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender

Pemerataan ekonomi, melalui pengembangan industri rakyat dan IKM, yang dimulai dari industri di pedesaan dan terintegrasi dengan industri di kota dan kawasan industri

Mempercepat pengembangan industri yang selaras dan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, melalui pengembangan industri hijau dan industri biru yang ramah lingkungan

01 Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia melalui pemantapan Pembangunan industri nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

02 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif

03 Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

04 Memperkuat Reformasi politik, hukum dan birokrasi melalui Regulasi Pintar (*Smart Regulation*)



KERANGKA STRATEGIS INDUSTRIALISASI:

1 Industrialisasi berbasis SDA

Mengubah kekayaan alam menjadi produk bernilai tinggi → Hilirisasi nikel, kelapa sawit, batubara, dll.

2 Pengembangan Ekosistem Industri

Industrialisasi harus terintegrasi dan inklusif → Klaster industry/ WPPI, backward-forward linkage, supply chain, SDM industri

3 Pengembangan Teknologi Industri

Keluar dari jebakan pengguna teknologi → Digitalisasi, kecerdasan buatan, otomatisasi, carbon capture

4 Industri Berkelanjutan

Keselarasan dengan keberlanjutan ekologi → industri hijau, industri biru, ekonomi sirkular

6 PRIORITAS SBIN

1



Prioritas Utama: Perlindungan Pasar Domestik

Jika pasar domestic goyah, industri dalam negeri akan runtuh. Pasar domestik harus dilindungi: Perluasan cakupan TKDN diperluas, Penguatan daya beli masyarakat, penguatan instrument tarif dan non tarif barrier, penataan ulang entry port impor barang jadi, dll.



6 PRIORITAS SBIN

2



Ekspansi Pasar Ekspor dan Orientasi Global

Menjaga ekspor ke pasar tradisional, memperluas ekspor ke pasar non-tradisional, diversifikasi pasar ekspor, optimalisasi perjanjian dagang untuk masuk ke rantai pasok global, diplomasi untuk ekspor produk bernilai tinggi

3



Investasi Bernilai Tambah dan Substitusi Impor

Setiap investasi harus menciptakan multi efek: penciptaan lapangan kerja berkualitas, memperkuat struktur industri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Investasi diarahkan ke industri bernilai tambah tinggi serta mendukung substitusi impor bahan baku dan bahan penolong

4



Pengembangan Teknologi, Inovasi, dan SDM

Restrukturisasi mesin, insentif R&D, kredit lunak untuk modernisasi industri harus diperluas/ditingkatkan. Transfer teknologi dari perusahaan global dan pengembangan SDM industri harus diintensifkan.

5



Reformasi Regulasi & Fight Lintas K/L

Percepatan smart regulation untuk sektor-sektor strategis dan sektor-sektor di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, regulasi afirmatif untuk mendukung peningkatan kandungan local, mendorong investasi, dan memberikan insentif untuk modernisasi teknologi, serta penyelarasan regulasi lintas K/L.

6 PRIORITAS SBIN

Industri Halal sebagai Motor Baru Pertumbuhan

Koordinasi intensif dengan K/L lain agar regulasi halal menjadi pendorong bukan penghambat. Ekosistem halal harus terintegrasi mulai dari bahan baku hingga sertifikasi. Indonesia harus menjadi produsen sekaligus pusat industry halal dunia.

Arah Kebijakan:

Penguatan
Ekosistem Halal

Peningkatan
Daya Saing

Perluasan
Pasar

Penguatan
Kerja Sama

Pengembangan
SDM

Tantangan:



Ketersediaan bahan baku



Proses sertifikasi halal yang kompleks dan mahal



Inovasi dan riset yang masih terbatas



Regulasi yang ketat dan kompleks



Terbatasnya ketersediaan LPH dengan ruang lingkup industri tertentu (kosmetik, farmasi, tekstil)



Tingkat literasi, kesadaran, dan pemahaman terhadap produk halal

BACKWARD AND FORWARD LINKAGES

Industri Tekstil sebagai Pilar Hilirisasi, Penciptaan Nilai Tambah, dan Penggerak Pemerataan Ekonomi

ASTA CITA : a) Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau & Biru, b) Lapangan Kerja Berkualitas c) Pengembangan SDM, Sains, Teknologi, d) Pengembangan Industri Hijau dan Berkelanjutan

BENEFIT : Peningkatan Ekspor, Peningkatan tenaga kerja & upah, Kemandirian industri DN



KINERJA 2024



Tenaga kerja
± 3,76 juta orang



Ekspor
USD 11,96 Miliar
(6,1% dari ekspor non



PDB
0,99%



Nilai Ekonomi
Rp 218,2 Triliun

DUKUNGAN EKSTERNAL

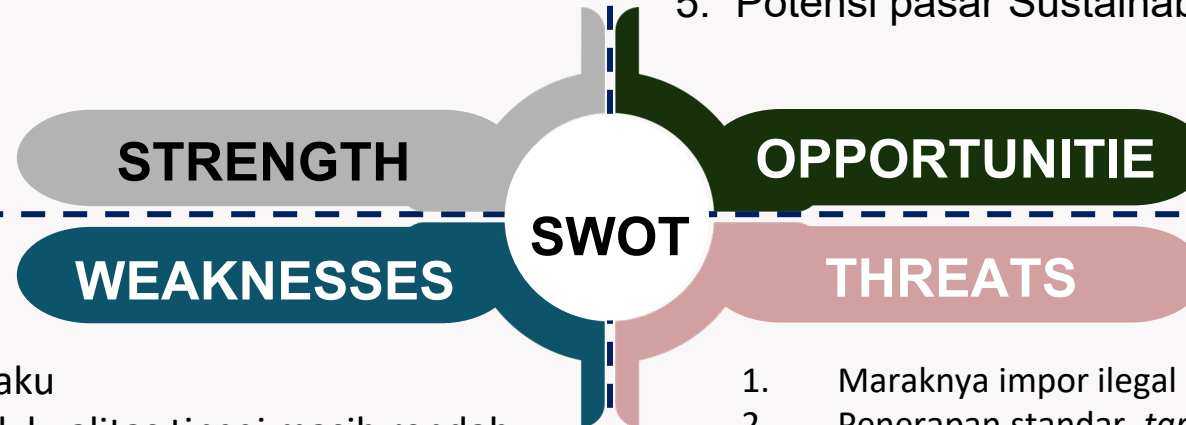
1. Pembiayaan kredit kompetitif & bunga rendah, (**Kemenko Perekonomian, Himbara, Kemenkeu, Danantara/BUMN**)
2. Kemudahan perizinan investasi (lingkungan) (**KLH**)
3. Implementasi Sustainability : standar, SDM, tracability, ekosistem (**Kemenkeu, Kemenaker, Komdigi**)
4. Peningkatan teknologi permesinan, 4.0 **Ditjen IKMA**)
5. Peningkatan SDM & pengupahan (**Kemenaker**)
6. Pengamanan pasar DN, penanganan impor ilegal, pembatasan Pelabuhan masuk (**Kemendag, TNI, POLRI, BAKAMLA, Kemenkeu**)
7. Akses pasar Ekspor (**Kemendag, Kemenlu**)
8. Insentif R&D dan insentif Ekspor (**BRIN, Kemenkeu**)

DUKUNGAN INTERNAL

1. Harga gas murah, pasokan PTA, MEG dan Paraxylene, zat warna dan zat pembantu ramah lingkungan (**IKHU**)
2. Dissolving Pulp rayon/Lyocell (**Ditjen IA**)
3. Industri permesinan dan peripheral/ sensor canggih (**Ditjen ILMATE**)
4. Optimalisasi dan upgrading IKM Dukungan (**Ditjen IKMA**)
5. Peningkatan kompetensi SDM, link and match, Pendidikan vokasi (**BPSDMI**)

1. Industri TPT sudah terintegrasi dari hulu ke hilir
2. Investasi yang terus meningkat
3. Ketersediaan SDM dan potensi bonus demografi
4. Kapasitas industri hulu tekstil (Poliester dan Rayon) yang besar
5. Potensi serat alam yang tinggi

1. Potensi pasar dan permintaan TPT global dan domestik yang tinggi dan terus meningkat
2. Peluang kerja sama terkait tarif resiprokal Trump & ekspor dalam kerangka FTA, IEU-CEPA
3. Potensi implementasi barang gunaan halal TPT
4. Kebijakan NZE dan pajak karbon di pasar global mendorong tumbuhnya sustainable textile
5. Potensi pasar Sustainable dan circular



1. Ketergantungan impor bahan baku
2. R&D dan pengembangan produk kualitas tinggi masih rendah
3. Permesinan didominasi mesin tua
4. Biaya energi yang tinggi dan isu *renewable energy*
5. Belum ada insentif dalam rangka ekspor TPT
6. Proses perizinan yang cenderung lambat

1. Maraknya impor ilegal dan impor pakaian bekas
2. Penerapan standar, *tariff barrier*, dan *non-tariff barrier* pada pasar tujuan Ekspor Ancaman negara pesaing baru (negara afrika, Kamboja, etc)
3. Stigma *sunset industry* terhadap industri TPT
4. Praktik *dumping & unfair trade* dari pesaing
5. Persyaratan *two-step process* dalam rangka IEU-CEPA berpotensi menjadi tantangan

Faktor Pemungkin Kunci dan Keperluan Regulasi Fiskal/Nonfiskal	Uraian Kebutuhan Spesifik	Estimasi Kebutuhan Sumber Daya	Target Pasar dan Nilai Tambah
KETERSEDIAAN BAHAN BAKU Keperluan Regulasi: - Insentif bahan baku lokal untuk tujuan ekspor dengan pembebasan PPN - Insentif khusus untuk investasi industri serat dan benang poliester - Pengendalian impor - Penguatan kapasitas dan kemampuan petani serat - Penelitian lanjut bio-based komposit dan advanced textile berbasis serat alam - Insentif investasi industri <i>lyocell</i> dan pengendalian impor rayon - Pembebasan PPN untuk kapas - Negosiasi dengan US, jaminan pasokan kapas dan penghapusan tarif untuk pakaian asal Indonesia yang menggunakan kapas US - Menciptakan kemandirian bahan baku serat dan filamen poliester	1. Penyediaan Pasokan PTA Dan MEG Serta Paraxylena	398 ribu ton	216 juta USD
	2. Peningkatan skala ekonomi Bio based material (<i>serat alam</i>)	313 ribu ton	2,1 miliar USD
	3. Peningkatan Produksi industri <i>dissolving pulp</i> rayon	330 ribu ton	361 juta USD
	4. Kapas	822 ribu ton (kapas US meningkat 90%)	1,06 miliar USD
	5. Peningkatan investasi serat poliester dan benang filamen	1,16 juta ton	1,39 miliar USD
PENGUASAAN LAHAN INDUSTRI Keperluan Regulasi: - Percepatan investasi - Percepatan Perizinan AMDAL/UKL/UPL - Kemudahan akses bahan baku <i>recycle</i>; insentif investasi <i>chemical recycling</i> - Penyediaan kawasan dengan fasilitas pengolahan limbah terpadu, bersih dan akses & recycle air baku	Kawasan khusus industri <i>Dyeing dan Finishing</i> (pengolahan limbah terpadu, bersih dan akses & recycle air baku) serta industri <i>recycle</i>	2 Kawasan Industri	Peningkatan Ekspor untuk pasar Uni Eropa & pemenuhan <i>two step process</i> serta kandungan <i>recycle</i>
INFRASTRUKTUR FISIK DAN LOGISTIK Keperluan Regulasi: Pembatasan pelabuhan masuk : Sorong, Kupang, Bitung (Permendag)	Pelabuhan masuk untuk produk jadi	Peningkatan Infrastruktur pelabuhan	- Pengurangan Impor - Peningkatan biaya logistik Rp 52-72 ribu - Penambahan tenaga kerja 54 ribu
ENERGI DAN UTILITAS Keperluan Regulasi: - Peraturan Presiden & Peraturan Menteri ESDM harga gas bumi tertentu (memasukan sektor tekstil dalam skema HGBT) - Optimalisasi biaya distribusi gas - Dukungan distribusi REC dan harga listrik murah dari PLN - Kebijakan energi bersih berbasis biomasa dengan harga kompetitif dan kemudahan perizinannya - Perubahan Permen ESDM dan peraturan dari PLN untuk pembatasan maksimum daya dari solar panel serta penghapusan sistem kuota - Penyediaan solar panel murah DN	1. Penyediaan Gas Murah (HGBT) untuk industri tekstil dan jangkauan distribusi ke kawasan industri tekstil	Harga gas 6 USD/mmmbtu	- Efisiensi Biaya Serat dan filamen - Penurunan biaya bahan baku untuk industri tekstil berikutnya - Peningkatan output 2-5%
	2. Energi: Listrik renewable murah	Penyediaan listrik <i>Renewable</i> dengan tarif listrik industri saat ini	Peningkatan ekspor, dengan pemenuhan green energi serta pencapaian NZE 2060
	3. Menghilangkan pembatasan dan kemudahan perizinan solar panel	Tidak ada pembatasan maksimum penggunaan solar panel	Peningkatan ekspor, dengan pemenuhan <i>green energy</i>

Faktor Pemungkin Kunci dan Keperluan Regulasi Fiskal/Nonfiskal	Uraian Kebutuhan Spesifik	Estimasi Kebutuhan Sumber Daya	Target Pasar dan Nilai Tambah
Pengembangan SDM dan Litbang Keperluan Regulasi: - Insentif untuk SDM sustainability & advanced manufacturing - Skema pengupahan khusus industri padat karya = unsur produktivitas - Insentif dan Penguatan R&D	Peningkatan Kompetensi SDM, <i>Link and Match</i> , Pendidikan Vokasi	- Peningkatan Kompetensi SDM, <i>Link and Match</i>, Pendidikan Vokasi terhadap 1 juta tenaga kerja di daerah tujuan investasi - Kemudahan perolehan <i>super deduction tax</i> vokasi 200%	Penyerapan tenaga kerja 1 jt orang
Penguatan Rantai Pasok Keperluan Regulasi: - Perpanjangan BMTP/Pengenaan BMAD Pakaian jadi - Pemberantasan impor ilegal dan unprosedural - Kebijakan dan insentif untuk structural adjusment industri - Pengembangan sistem rantai pasok yang terlacak (traceability) hulu – hilir dan siklus daur ulangnya - Dukungan pelaksanaan pemenuhan persyaratan IEU-CEPA <i>Market access</i> dan market intelegence pasar ekspor	1. Perlindungan pasar dalam negeri	- BM tambahan 19 ribu – 63 ribu per pcs pakaian - Penambahan personil pengawasan dari BC, TNI, POLRI, BAKAMLA untuk pemberantasan impor ilegal, unprosedural dan penjagaan pelabuhan	- Tambahan Penerimaan PNPB dari bea masuk tambahan 19 ribu – 63 ribu per pcs pakaian - Penerimaan bea masuk dan pajak dari impor yang sebelumnya ilegal - Pertumbuhan industri dalam negeri & penyerapan tenaga kerja
	2. Pengembangan pasar dan market intelegence ekspor	- Pendampingan Akses pasar dalam kerangka IEU-CEPA - Insentif dan kerjasama dengan negara timur tengah	Tambahan devisa ekspor dan penyerapan tenaga kerja
Pengembangan SDM dan Litbang Keperluan Regulasi: - Permenko 4/2025, PMK 55/2025 dan Permenperin - Dukungan Perbankan & Dukungan anggaran Kemenkeu - Dukungan penelitian sesuai dengan arah pengembangan, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah TPT (BRIN dan lembaga penelitian) - Dukungan implementasi <i>super deduction tax</i> Kemenkeu	1. Pelaksanaan Kredit bunga rendah	Rp 100 triliun per tahun (5 tahun untuk seluruh sektor padat karya)	Peningkatan investasi, peremajaan mesin dan penambahan kapasitas, penambahan tenaga kerja, dan substitusi impor
	2. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	Rp 100 miliar/tahun	
	3. Insentif R&D	Kemudahan perolehan <i>super deduction tax</i> untuk R&D dan Insentif R&D di BRIN dan penelitian Universitas	Peningkatan nilai tambah produk

INDONESIA MENJADI NEGARA INDUSTRI BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

VISI Pembangunan Industri

BERDAULAT

Keberlangsungan industri nasional diutamakan menggunakan sumber daya dalam negeri

MAJU

Sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian

BERKELANJUTAN

Pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

Misi 1: Memperkuat dan Memperdalam Struktur Industri Nasional Melalui Hilirisasi Industri

Strategi 3 : Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri

Strategi 4 : Partisipasi dalam rantai nilai global

Misi 2: Meningkatkan Produktivitas Industri Pengolahan

Strategi 5 : Pembangunan SDM Industri

Strategi 6 : Jaminan ketersediaan dan penyaluran bahan baku/penolong serta energi

Strategi 8 : Percepatan transformasi *digital industry*

Misi 3: Meningkatkan Ekspor Produk dan Jasa Industri

Strategi 9 : Peningkatan daya saing produk dan jasa industri

Strategi 10 : Perluasan Pasar

Strategi 11 : Dukungan pembiayaan ekspor

Misi 4: Meningkatkan Penguasaan Pasar Dalam Negeri

Strategi 12 : Peningkatan penggunaan produk dalam negeri,

Strategi 13 : Pengembangan ekosistem industri halal,

Strategi 14 : Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Industri dan Kawasan Industri yang Berkelanjutan

Strategi 15 : Pembangunan industri hijau dan penerapan ekonomi sirkular

Strategi 16 : Percepatan transisi energi dan dekarbonisasi sektor industri pengolahan

Backward-Forward Linkage Sektor Petrokimia

DUKUNGAN SEKTOR MIGAS

ESDM:

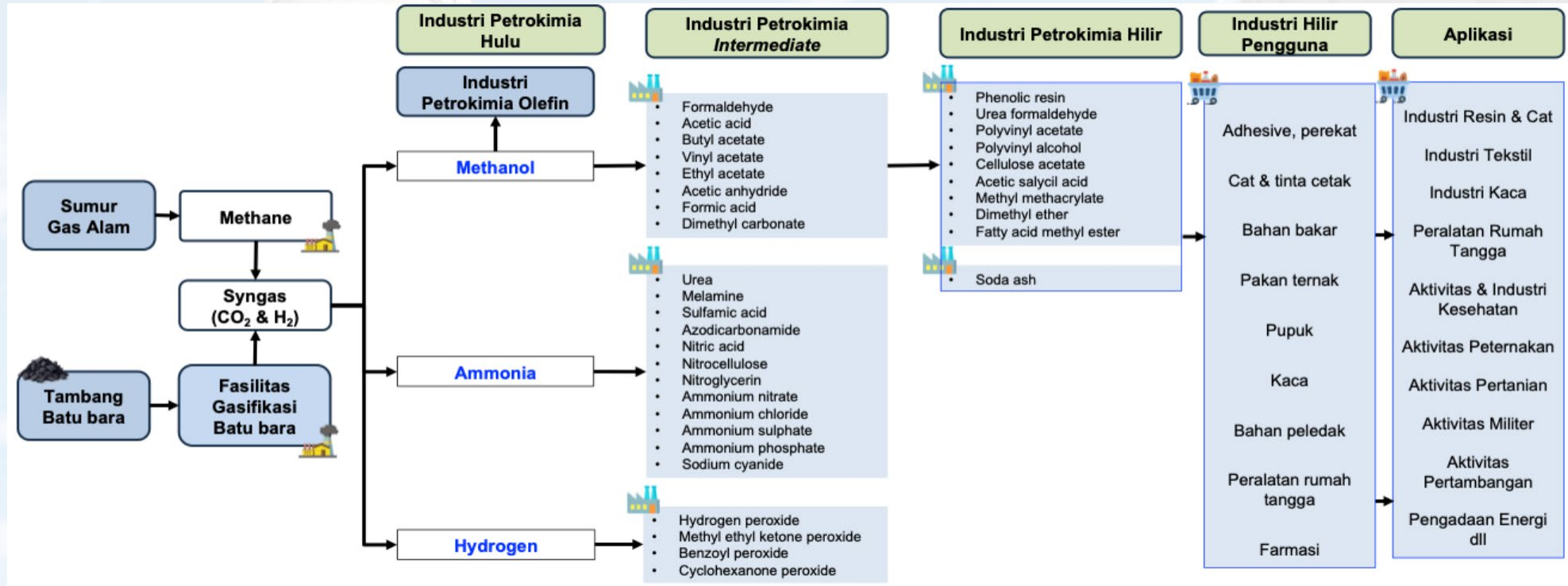
- Ketersediaan bahan baku industri yang memadai dengan harga yang terjangkau
- Penetapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri
- Fasilitasi kegiatan pengadaan energi dan bahan bakar
- Kebijakan terkait *off-taker* produk hilirisasi batubara

DUKUNGAN MINERBA ESDM:

- Kebijakan penetapan tarif harga tertentu yang lebih panjang
- Penghapusan royalti batubara untuk bahan baku gasifikasi)
- penetapan *domestic market obligation* (DMO)
- Kebijakan pengembangan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS)
- Kebijakan pengenaan pajak karbon untuk industri
- Fasilitasi kegiatan pertambangan

DUKUNGAN SEKTOR INVESTASI DAN HILIRISASI:

- Fasilitasi investasi baik pembangunan maupun perluasan industri petrokimia
- Rekomendasi pemberian fasilitas fiskal Tax Holiday atau Mini Tax Holiday untuk industri petrokimia



DUKUNGAN SEKTOR KEUANGAN:

- Kebijakan pemberian fasilitas Tax Holiday atau Mini Tax Holiday
- Pemberian fasilitas fiskal lainnya untuk industri petrokimia

DUKUNGAN SEKTOR IKFT (IKHF, ISKPBGNL, & ITKAK):

- Fasilitasi industri farmasi, peralatan rumah tangga, kaca, tekstil, *consumer goods*, dan industri lain pengguna produk petrokimia hilir
- Fasilitasi kebijakan penggunaan bahan baku lokal untuk industri hilir (pengguna)

DUKUNGAN SEKTOR PERTANIAN:

- Fasilitasi kegiatan pertanian

DUKUNGAN SEKTOR PERTAHANAN:

- Fasilitasi aktivitas atau kegiatan militer

DUKUNGAN SEKTOR PETERNAKAN:

- Fasilitasi aktivitas peternakan

Enabling Factors

Enabling factors sebagai syarat keberhasilan SBIN:

1 Ketersediaan Bahan Baku

Yang terjamin dengan harga yang kompetitif, kualitas yang terjaga, dan pasokan yang berkelanjutan

2 Lahan Industri yang Strategis

Yang terintegrasi dengan infrastruktur logistic, energi, dan perumahan pekerja

3 Logistik yang Efisien

Pembangunan infrastruktur transportasi, Pelabuhan, dan cold chain harus selaras dengan kebutuhan industri

4 Energi yang Berkelanjutan

Pasokan energi yang kompetitif dan ramah lingkungan agar sesuai dengan tren dekarbonisasi global

5 SDM yang Kompeten

Sistem pendidikan (vokasi) harus link and match dengan dunia industri

6 Kolaborasi Riset dan Inovasi

Kolaborasi antara Kemenperin, BRIN, perguruan tinggi, dan industri harus diperluas dan dipercepat

7 Regulasi yang Cerdas

Regulasi yang afirmatif, memberikan kepastian hukum, mendukung inovasi, dan mempercepat inovasi,

8 Kebijakan TKDN yang Terintegrasi

Dengan pengembangan bioindustry, petrokimia, dan dekarbonisasi



Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Dan Bobot Manfaat Perusahaan

KINERJA



TINGKAT
KOMPONEN
DALAM NEGERI



88.218 produk tersertifikasi TKDN (Pertanggal 11 September 2025)



15.000+ perusahaan industri



Dampak: produksi berkelanjutan, tenaga kerja, pajak, pertumbuhan ekonomi

Reformasi: Insentif

Sebelum

Tidak ada insentif nilai TKDN bagi pelaku usaha yang berinvestasi di sektor industri manufaktur



Sesudah

Insentif mendapatkan nilai TKDN minimal 25% apabila perusahaan berinvestasi di dalam negeri

Tidak ada insentif yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan litbang



Pelaku usaha yang telah melakukan litbang diberikan tambahan nilai TKDN hingga maksimal 20%.

Tidak ada mudah mendapatkan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) maksimal 15%



Mendapatkan nilai BMP 15% lebih mudah karena terdapat 15 komponen pembentuk nilai BMP yang dapat dipilih

Reformasi: Kemudahan

Sebelum

Komponen litbang dimasukkan dalam penghitungan TKDN Barang dan berbasis biaya



Sesudah

Kemudahan perhitungan dalam menentukan TKDN dari aspek nilai kemampuan intelektual melalui litbang

Industri Kecil mendapatkan nilai TKDN maksimal 40% dengan masa berlaku sertifikat selama 3 tahun



Metode *self declare* memudahkan Industri Kecil mendapatkan TKDN lebih dari 40% dengan dengan masa berlaku 5 tahun.

Untuk melihat besaran nilai TKDN, konsumen harus melihat Daftar Inventaris Barang bersertifikat TKDN



Info besaran nilai TKDN di Tanda TKDN yang dicantumkan dalam label dan juga kemasan produk.

Tidak ada tata cara terkait pengajuan TKDN Jasa Industri



Sertifikasi TKDN Jasa Industri dapat diajukan dengan perhitungan komponen biaya tenaga kerja, alat dan jasa umum

Reformasi: Penyederhanaan

Sebelum

Penghitungan TKDN yang berbasis biaya rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama



Sesudah

Penghitungan TKDN tidak menggunakan pendekatan biaya secara keseluruhan (kecuali penghitungan TKDN Jasa Industri)

Terdapat 2 Tingkat penghitungan TKDN Barang dengan syarat yang cukup kompleks



Bahan/material langsung dilihat nilai TKDN yang dimiliki Tingkat ke-2, jika tidak ada TKDN maka dilihat dari asal barang

Sertifikat TKDN dan/atau BMP berlaku selama 3 tahun



Sertifikat TKDN dan/atau BMP berlaku selama 5 tahun dengan pengawasan yang dilakukan dengan lebih terstruktur

Reformasi: Kecepatan

Sebelum

Penghitungan TKDN dilakukan sampai dengan layer ke-3 dengan waktu yang relatif lama



Sesudah

Penghitungan dilakukan hanya sampai layer ke-1 dengan melihat sertifikat TKDN dan kandungan dalam negeri yang dimiliki perusahaan industri layer ke-2.

Sertifikasi TKDN melalui LVI membutuhkan 22 hari kerja dan TKDN Industri Kecil 5 hari kerja setelah dokumen lengkap.



Sertifikasi TKDN melalui LVI membutuhkan 10 hari kerja dan TKDN Industri Kecil 3 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Penghitungan kandungan Tenaga Kerja Langsung dan Biaya Tidak Langsung Pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi biaya



Penghitungan kandungan Tenaga Kerja Langsung dan Biaya Tidak Langsung Pabrik dilakukan berdasarkan checklist pada komponen pembentuk

TERIMA KASIH



<http://ikft.kemenperin.go.id>



Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin



[ditjen.ikft](https://www.instagram.com/ditjen.ikft)

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Gedung Kementerian Perindustrian, Lantai 9-10
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 52-53, Setiabudi, Jakarta Selatan, DK Jakarta 12950